

# Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa Balongdowo

Oleh:

Pungki Rokmahwati

Ilmi Usrotin Choiriyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2026

# Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan dinamika sistem pemerintahan. Namun, kondisi SDM di Pemerintah Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas yang dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang pendidikan mulai dari SMP hingga sarjana serta struktur usia aparatur yang sebagian besar berada di atas 40 tahun. Kondisi ini berdampak pada kemampuan adaptasi perangkat desa terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi informasi, di mana perangkat yang lebih senior cenderung memerlukan waktu lebih lama dalam mengoperasikan aplikasi dan sistem administrasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas seperti bimbingan teknis (BIMTEK), sosialisasi, workshop, dan forum diskusi yang mencakup materi administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan desa, perpajakan, serta penggunaan sistem informasi berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur Desa Balongdowo menggunakan Teori Griffin (2004) yang menitikberatkan pada tiga indikator utama: pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, dengan menggunakan perspektif teori Griffin (2004), serta keterkaitannya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

- Bagaimana pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa Balongdowo, Kecamatan Candi ditinjau dari indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman menurut teori Griffin (2004)?
- Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur Desa Balongdowo dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan publik?

# Metode

## Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif

## Teori Implementasi Menurut Griffin

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Pengalaman

## Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

## Lokasi Penelitian

Desa Balongdowo Kecamatan Candi  
Kabupaten Sidoarjo

## Teknik Penentuan Informan

1. Sekretaris Desa
2. Kaur TU dan Umum
3. Kaur Kesejahteraan

## Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder

# Hasil dan Pembahasan

## 1. Pendidikan

Indikator pendidikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa Balongdowo menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang SMP, SMA/SMK, hingga sarjana. Keberagaman tersebut mencerminkan variasi dasar pengetahuan formal yang dimiliki masing-masing perangkat dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik. Meskipun demikian, perbedaan jenjang pendidikan ini secara umum tidak menghambat pelaksanaan tugas, karena setiap aparatur tetap menjalankan peran sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk mengisi kesenjangan pemahaman yang muncul akibat keberagaman pendidikan tersebut, perangkat desa dilibatkan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya. Secara keseluruhan, kondisi pendidikan aparatur Desa Balongdowo telah cukup mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, namun keberagaman latar belakang akademik yang cukup lebar mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar seluruh aparatur dapat menjalankan tugas administrasi dan pelayanan publik secara lebih merata dan optimal.

# Hasil dan Pembahasan

## 2. Pelatihan

Indikator Pelatihan dalam pengembangan kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo menunjukkan bahwa perangkat desa mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Candi, dengan materi yang disesuaikan bidang tugas masing-masing, seperti pengelolaan keuangan desa, administrasi kependudukan, perpajakan, dan sistem informasi digital. Sementara itu, pelatihan yang bersumber dari anggaran desa tidak dilaksanakan secara rutin karena bergantung pada ketersediaan dana dan kesepakatan musyawarah penyusunan APBDes. Secara keseluruhan, kebutuhan pelatihan aparatur Desa Balongdowo sebagian besar dipenuhi melalui program kecamatan, namun frekuensi dan kesinambungannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh perangkat dapat beradaptasi secara merata terhadap perubahan sistem kerja dan teknologi administrasi. berkelanjutan.

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Pengalaman

Indikator pengalaman dalam pengembangan kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo menunjukkan bahwa pengalaman kerja aparatur terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia, yang tercermin dalam cara masing-masing perangkat menjalankan tugas administrasi dan pelayanan publik. Aparatur senior memiliki pemahaman prosedural yang lebih mendalam, sementara aparatur yang lebih muda cenderung lebih adaptif terhadap sistem administrasi berbasis teknologi. Kondisi ini menciptakan dinamika kerja yang saling melengkapi, di mana aparatur muda kerap memberikan pendampingan teknologi kepada perangkat senior. Secara keseluruhan, keragaman pengalaman kerja di Desa Balongdowo menjadi aset kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun penyesuaian terhadap sistem digital masih menjadi tantangan bagi kelompok usia yang lebih senior.

# Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo telah berjalan melalui tiga indikator utama yakni pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Keberagaman latar belakang pendidikan aparatur secara umum tidak menghambat pelaksanaan tugas, sementara pelatihan dan bimbingan teknis dari Kecamatan Candi telah membantu perangkat dalam memahami sistem administrasi digital meskipun belum berjalan rutin. Pengalaman kerja yang beragam berdasarkan usia dan masa kerja menciptakan dinamika kolaboratif antara perangkat muda dan senior. Namun, kesenjangan kemampuan adaptasi teknologi pada aparatur berusia di atas 40 tahun serta ketergantungan pelatihan pada ketersediaan anggaran masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih terstruktur dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar seluruh aparatur dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan merata.

# Manfaat Penelitian

- Memberikan gambaran nyata kondisi kapasitas SDM aparatur desa sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Desa Balongdowo.
- Menjadi acuan bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam merancang program pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan aparatur.
- Memberikan rekomendasi penyediaan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam peningkatan kemampuan adaptasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
- Memperkaya kajian pengembangan kapasitas SDM dalam konteks pemerintahan desa dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait profesionalisme aparatur desa.

# Referensi

- [1] Y. Mozin and R. Isa, “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa,” vol. 4, 2023.
- [2] I. Choiriyah, L. Mursyidah, H. Sukmana, and I. Agustina, “The Role of the Village Government in Improving Public Services for the Keboansikep Village Community,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, vol. 2, no. 1, p. 11, Mar. 2021, doi: 10.47134/villages.v2i1.238.
- [3] Ramli, “Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, vol. 2, p. 16, Sep. 2020.
- [4] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.”
- [5] “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.”
- [6] “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.”
- [7] I. Rodiyah *et al.*, “Pengembangan Kapasitas Sdm Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo,” *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 6–7, 2021, doi: 10.26905.
- [8] F. Fitriani, A. D. Saharuddin, and M. Masyhadiah, “Profesionalisme Kepala Desa Sebagai Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Peningkatan Pemerintah Desa Di Desa Taan,” *Journal Pegguruang: Conference Series*, vol. 2, no. 2, p. 825, Nov. 2021, doi: 10.35329/jp.v3i2.2209.
- [9] R. Adhi Hapsari, “Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung),” 2021. [Online]. [www.dindukcapil.temanggungkab.go.id](http://www.dindukcapil.temanggungkab.go.id)
- [10] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009”.

# Referensi

- [11] Moeljono and N. Alfiyanto, “Up Grading Capacity Aparatur Desa Melalui Pelatihan di Desa Tegalarum Kabupaten Demak,” Jan. 2020.[12] J. Pramono and J. Suranto, “Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta,” *Jurnal Abdimas Serawai*, vol. 2, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>
- [13] R. Hidayat, U. Timumun, F. Prihatini, D. Tui, and R. Tohopi, “Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menuju Desa Digital di Desa Doulan Kecamatan Bokot Kabupaten Buol,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 9, pp. 420–424, 2024, doi: 10.5281/zenodo.13846434.
- [14] P. L. Lumbanraja and P. C. Lumbanraja, “Sistematikal Review: Peningkatan Kompetensi Sdm Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Indonesia),” 2024. <https://10.0.205.137/jikk.v7i1.574>
- [15] Sabilatur Rosyidah et al., “Proses Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur,” *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 07–21, Dec. 2023, doi: 10.59061/dinamikapublik.v2i1.550.
- [16] E. Agusta and I. Jaya, “Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” 2021.
- [17] Haliza and Fatimah, “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang,” *DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.31850/decision.v5i2.3293>
- [18] Khumaidi and H. Fani, “Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa Sentul Purwodadi Pasuruan,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 4, 2024.
- [19] T. W. Wijaya, C. Damarjati, and A. Kurnianti, “OPEN ACCESS Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Sistem Informasi Desa Berbasis Website Increasing Human Resources in Managing Website-Based Village Information Systems,” vol. 8, no. 2, 2023, doi: 10.25047/j-dinamika.v8i2.4017.
- [20] R. W. Griffin and Gina Gania, *Manajemen*, 7th ed. Jakarta: Erlangga, 2004.[21] Nikodimus, “Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desa,” Mar. 2022.

# Referensi

- [20] R. W. Griffin and Gina Gania, *Manajemen*, 7th ed. Jakarta: Erlangga, 2004. [21] Nikodimus, “Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desa,” Mar. 2022.
- [22] P. Candra Susanto, D. Ulfah Arini, L. Yuntina, and J. Panatap Soehaditama, “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” 2024, doi: 10.38035/jim.v3i1.
- [23] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” 2023. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- [24] Yuliana, “Konflik Lahan Di Provinsi Jambi,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 14, Dec. 2024, [Online]. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- [25] N. N. Alianinggrum et al., “Penyaringan Fakta dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi pada Pemilu 2024,” 2023. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC>
- [26] A. Riewpassa, B. Patria Latuheru, and dan Godprit Haris Touwely, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa: Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima,” *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, pp. 72–82, 2025, doi: 10.51135/kambotivol5issue2p.
- [27] D. R. B. Siregar and A. Suryani, “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu,” pp. 273–279, Jun. 2025.
- [28] A. Ragil Kuncoro, S. Hartono, O. Wibowo, P. Keuangan Negara STAN, and M. Aset, “Pemberdayaan Sdm Bumdesa: Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung,” vol. 6, no. 1, 2024.

